

EDITORIAL COMMENTARY ■ KOMENTAR EDITOR

Underlining the Meaning of Law and Justice in the Era of Sustainable Development Goals (SDGs)

Menggarisbawahi Arti Hukum dan Keadilan dalam Era *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Ridwan Arifin¹, Waspiah Waspiah²

^{1,2} Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Email: ridwan.arifin@mail.unnes.ac.id

“Ubi Soceitas Ibu Ius, Hukum Hidup dan Berkembang dalam Masyarakat” Cicero

Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi banyak permasalahan dan tantangan, baik itu dalam aspek sosial, budaya, ketahanan dan keamanan, pendidikan, penegakan hukum, kesehatan, dan lainnya. Tantangan-tantangan yang ada adalah satu bukti bahwa perkembangan internasional semakin cepat dan memberikan dampak yang signifikan bagi perkembangan nasional. Salah satu tantangannya juga adalah bagaimana mewujudkan tujuan di era pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*) atau SDGs, yang mencakup segala aspek berbangsa dan bernegara.

Lex Scientia Law Review Volume 2 Nomor 1 Mei 2018 kali ini mengangkat topik utama tentang “Berbagai Aspek Hukum dan Keadilan dalam Era Pembangunan Berkelanjutan”, yang diharapkan mampu memberikan wacana baru perihal berbagai perkembangan yang ada. Arti keadilan dan hukum itu sendiri, terus berkembang dan mengikuti kebutuhan zamannya, hingga seringkali berbenturan antara paham satu dengan paham lainnya. Ketidakmampuan dalam mendefinisikan hukum dan keadilan dalam satu definisi yang sama, memberikan banyak warna dan pandangan akan keadilan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Tulisan-tulisan yang hadir pada edisi kali ini memiliki sudut pandang dan perspektif yang beragam, dimana hadir dari buah pemikiran mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dari berbagai angkatan.

Aldhanalia Pramesti Salsabila dengan tulisannya berjudul *Pengotimalan Satgas 115 dengan Model Koordinasi Satgas Pusat dan Daerah Sebagai Bentuk Pencegahan Illegal Transshipment di Indonesia*, mencoba memberikan gambaran tentang potensi kelautan Indonesia yang bisa dioptimalkan di era SDGs dan tantangannya dalam penegakan hukumnya. Tulisan lainnya, ditulis **Rohmat**, *Sinergitas Hukum Adat dalam Aktualisasi Edukasi Berbasis Kearifan Lokal bagi Masyarakat Adat Nelayan Pantura Sebagai Upaya Pembangunan Pendidikan yang Menyeluruh dan Berkualitas*, menggaris-bawahi tentang bagaimana era SDGs ini bisa bersinergi dengan konsep hukum adat dalam menyediakan hak-hak pendidikan sebagai hak dasar.

Dua tulisan lainnya, ditulis **Rintan Purnama Ayu Apriliani**, *Pengentasan Kemiskinan di Desa Talok Melalui Pendidikan Non Formal Berbasis Anyaman Bambu dengan Metode Pembangunan Berkelanjutan Oasal 7 UU No. 13 Tahun 2011 Menuju Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia 2045*, dan **Batari Laskarwati**, *Implementasi Nilai Kebermanfaatan Hukum dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Melalui Lomba Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM)*, memberikan dua perspektif yang hampir serupa tentang bagaimana mengoptimalkan peran masyarakat di era SDGs dalam bidang pendidikan dan hukum. Selain itu, tulisan lainnya oleh **Nandri Kanisius Manihuruk**, *Sekolah Cepat Edukasi Hukum Media Sosial (SEPAT KASIH MEDSOS) Edukasi Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Kejahatan Ujaran*

Kebencian Melalui Media Sosial, menawarkan solusi atas berbagai masalah ujaran kebencian di era SDGs.

Tiga tulisan lainnya fokus pada implementasi peraturan perundang-undangan berkaitan dengan hak-hak dasar dan berbagai kewenangan lembaga penegak hukum, **Tirta Mulya Wira Pradana** mengangkat judul *Penerapan Putusan MK tentang Aliran Kepercayaan di Indonesia Demi Mewujudkan SDGs 2030 Poin 16 (Peace, Justice, and Strong Institution) Studi Kasus di Desa Cening Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah*, **Khoiril Huda** dengan judul *Wujud Nyata Pelaksanaan Bab XIV UUD 1945 yang Berkaitan dengan Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Demi Melaksanakan Tujuan SDGs 2030 Melalui Desa Binaan Mandiri Undiversitas*, dan **Iqbal Syarifudin** dengan judul *Pembentukan Detasemen Khusus Anti Korupsi dan Kaitannya dengan Potensi Dualisme Pemberantasan Korupsi di Indonesia*.

Pada akhirnya, kami ucapkan selamat membaca, dan kami berharap bahwa edisi kali ini dapat memicu kajian lebih lanjut berkaitan dengan berbagai aspek hukum lainnya yang ada pada era *sustainable development goals* di Indonesia.

Bacaan Lanjutan

- Arifin, Ridwan. "Democracy on Indonesian Legal Reform: How Can People Participate on Laws and Regulations Establishment Process." *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)* 2, no. 2 (2017): 155-158.
- Arifin, Ridwan. "Revealing the Other Side of Human Rights Issue: How We Look to the Existed Various Problems." *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)* 2, no. 1 (2017): 79-82.
- Cruz, Hardie Gieben M., et al. "Exploring fairness and justice: Meanings, relationships and values." *The Online Journal of New Horizons in Education* 6, no. 2 (2016): 20.
- Kahn, Charles H. "The Meaning of 'Justice' and the Theory of Forms." *Plato and Modern Law*. Routledge, 2017. 337-349.
- Levi, Alessandro. "Ubi societas, ibi ius." *Rivista di Filosofia* 16, no. 2 (1925).
- Martínez Roldán, Luis. "Derecho versus utopía (ubi societas ibi ius)." *Anuario de filosofía del derecho* (2007): 365-386.

ADAGIUM HUKUM

**QUID LEGES
SINE MORIBUS**

Apalah artinya hukum
tanpa moralitas